

Elastisitas penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah Kota Jambi

M. Reno Maulana; Selamat Rahmadi; Parmadi

Prodi Ekonomi Pembangunan Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

E-mail korespondensi : muhammadreno99@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is 1) to analyze the proportion of sources of local tax revenues to total local tax revenues and locally-generated revenue in the city of Jambi. 2) To analyze the elasticity of sources of local tax revenue and the elasticity of locally-generated revenue in Jambi City. The data used are secondary data during the period 2006-2015. Data were analyzed descriptively quantitative. The results of the study found that 1) The proportion of the largest tax source to total taxes and locally-generated revenue in Jambi City in 2006-2015 came from street lighting tax, while the lowest proportion of entertainment tax; 2) The largest tax elasticity in Jambi City in 2006-2015 is entertainment tax and the lowest is advertisement tax

Keywords: *Sources of tax revenue, Regional taxes, Locally-generated revenue*

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah 1) untuk Menganalisis proporsi sumber-sumber penerimaan pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jambi. 2) Untuk menganalisis tingkat elastisitas sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan elastisitas Pendapatan Asli Daerah di Kota Jambi. Data yang digunakan adalah data sekunder selama periode 2006-2015. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Proporsi sumber pajak terbesar terhadap total pajak dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jambi pada Tahun 2006 -2015 bersumber dari pajak penerangan jalan, sedangkan proporsi terendah dari pajak hiburan; 2) Elastisitas pajak terbesar di Kota Jambi pada Tahun 2006 -2015 adalah pajak hiburan dan yang terendah adalah pajak reklame

Kata Kunci : Sumber-sumber Pajak daerah, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pembangunan adalah kemajuan dan perbaikan yang terus-menerus menuju tercapainya tujuan yang diinginkan. Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup segala bidang yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemampuan di bidang keuangan merupakan salah satu indikasi dalam mencapai tujuan pembangunan. Terkait dengan hal diatas, kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan adil, tentu membutuhkan suatu sistem tentang hubungan pusat dan daerah, terutama dalam kaitan dengan bantuan pusat dan pembagiannya. Di dalam era otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Seperti menyediakan barang

dan jasa bagi penduduk di suatu wilayah tertentu seperti di dalam penerangan jalan, mobil pemadam kebakaran, penyediaan lampu lalu lintas dan sebagainya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah sejalan dengan pelimpahan fungsi-fungsi tersebut. Pemerintah daerah mendapat hak di bidang keuangan yang dapat di gali sebagai penerimaan keuangan daerah dan pemerintah provinsi memberi kewenangan kepada pemerintah kabupaten/Kota untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan secara langsung dan leluasa. Sumber-sumber keuangan yang dapat digali sebagai penerimaan daerah tidak akan terlepas dari potensi dan modal dasar tersebut berhasil dikelola dan dimanfaatkan mencerminkan seberapa besar penerimaan yang diperoleh. Pengembangan dan pengelolaan secara efektif dan efisien seluruh potensi dan modal dasar yang ada di suatu daerah, memungkinkan terjadinya penerimaan daerah.

Sehubungan dengan adanya otonomi daerah, pemerintah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, bahwa efisiensi dan elastisitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu di tingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman pemerintah daerah, peluang dan tantangan dan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah di sertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Mengingat sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan harus di tingkatkan. Kegiatan pembangunan di Kota Jambi secara keseluruhan dalam pelaksanaan pembangunan juga memerlukan pembiayaan demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan penting dalam keuangan daerah yang merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, seperti halnya di daerah lain di Indonesia.

Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan harus di dukung dengan ketersediaan dana yang memadai. Ketersediaan dana yang memadai sangat di tentukan oleh upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan rencana strategis yang merupakan tolak ukur penilaian.

Penerimaan PAD Kota Jambi selama periode 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 penerimaan PAD sebesar Rp 78.354.836.287,- pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 100.633.402.120,- atau meningkat sebesar 22,27 persen. Pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi Rp109.338.025.215,- atau meningkat sebesar 8.64 persen, tahun 2014 meningkat sebesar246.427.699.826 atau menignkat sebesar 125,38 persen, dan tahun 2015 PAD Kota Jambi meningkat menjadi Rp 263.925.520.119 ,- atau mengalami peningkatan sebesar 7,10 persen.

Keuangan daerah merupakan kunci utama bagi penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sebagai salah satu bentuk otoritas yang dimiliki untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan yang dimiliki pada akhirnya mampu menutupi dan membiayai penyelenggaraan pembangunan. Agar terlaksana aktifitas perekonomian dapat meningkat maka dibutuhkan pemasukan dan pengelolaan keuangan daerah secara kontinyu. PAD sendiri bersumber dari 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Bagian

Laba Badan Usaha Milik Daerah 4. Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah 5. Penerimaan Lain-lain.

Penerimaan pajak daerah Kota Jambi selama lima tahun terakhir dari 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 penerimaan pajak daerah sebesar Rp 59.570.219.207,- pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 73.344.781.806 atau meningkat sebesar 23,12 persen. Pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi Rp 97.875.345.000,- atau meningkat sebesar 33,44 persen, pada tahun 2014 penerimaan pajak daerah meningkat menjadi Rp.128.824.086.122 atau meningkat sebesar 31,62 persen. Pada tahun 2015 pajak daerah kembali meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 186.882.000.000 atau meningkat sebesar 45,06 persen.

Pajak daerah yang di kelola pemerintah di Kota Jambi berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengelolaan Bahan Golongan C dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Proporsi sumber-sumber penerimaan pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah dan PAD di Kota Jambi selama tahun 2006-2015. (2) slastisitas sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan elastisitas PAD di Kota Jambi tahun 2006-2015.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi Selama Tahun 2006-2015, realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Jambi Selama Tahun 2006-2015., realisasi Penerimaan Sumber-sumberPajak Daerah Selama Tahun 2006-2015. Sumber data diperoleh dari instansi-instansi terkait terutama dari Badan Pusat Statistik Kota Jambi dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Jambi

Untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menganalisis proporsi sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan PAD di Kota Jambi selama tahun 2006-2015 dilakukan secara deskriptif. Untuk menjawab tujuan penelitian kedua yaitu untuk menganalisis tingkat elastisitas sumber-sumber penerimaan pajak daerah Kota Jambi selama tahun 2006-2015 maka pengolahan data dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut: Daud dalam Halim (2004).

$$a. \quad ESPPDi = \frac{\% \Delta S}{\% \Delta P}$$

Dimana :

ESPPDi = Elastisitas sumber penerimaan pajak daerah

%ΔSPPDi = Perubahan sumber penerimaan pajak daerah tahun i

%ΔPDRB = Perubahan PDRB

Kriteria pengelompokkan elastisitas :

- Elastis, ($E > 1$) artinya jika persentase perubahan PDRB berubah 1% akan memberikan pengaruh perubahan sumber penerimaan pajak daerah lebih besar dari 1%.
- In-Elastis, ($E < 1$) artinya jika persentase perubahan PDRB berubah 1% akan memberikan pengaruh perubahan Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dari 1%.
- Unitary Elasticity, ($E = 1$) artinya jika persentase perubahan PDRB berubah 1% akan memberikan pengaruh perubahan yang sama terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya untuk menganalisis tingkat elastisitas Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi selama tahun 2006-2015 maka pengolahan data dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut: Daud dalam Halim (2004).

$$EPAD = \frac{\% \Delta P}{\% \Delta P}$$

Dimana :

EPAD = Elastisitas Pendapatan Asli Daerah

% Δ PAD = Perubahan Pendapatan Asli Daerah i

% Δ PDRB = Perubahan PDRB

- Elastis, ($E > 1$) artinya jika persentase perubahan PDRB berubah 1% akan memberikan pengaruh perubahan pendapatan asli daerah daerah lebih besar dari 1%.
- In-Elastis, ($E < 1$) artinya jika persentase perubahan PDRB berubah 1% akan memberikan pengaruh perubahan Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dari 1%.
- Unitary Elasticity, ($E = 1$) artinya jika persentase perubahan PDRB berubah 1% akan memberikan pengaruh perubahan yang sama terhadap Pendapatan Asli Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2000). Adapun yang menjadi dasar hukum pendapatan asli daerah (PAD): (1) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. (2) Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. (3) Peraturan pemerintah nomo 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, sumber pendapatan asli daerah (PAD). (Yani, 2004). Adapun sumber pendapatan asli daerah (PAD) dapat dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu : (1) Pajak daerah. (2) Retribusi daerah. (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah. (4) Lain-lain pendapatan asli daerah.

Proporsi sumber-sumber pajak terhadap total pajak daerah di Kota Jambi

Tabel 1 berikut memberikan proporsi sumber-sumber pajak (hotel, restoran, hiburan, reklame dan penerangan jalan) terhadap total pajak daerah Kota Jambi selama tahun 2006 – 2015.

Tabel 1. Proporsi sumber-sumber pajak terhadap total pajak daerah Kota Jambi Tahun 2006-2015 (%)

Tahun	Hotel	Restoran	Hiburan	Reklame	Penerangan Jalan
2006	6,41	12,52	3,44	14,05	61,44
2007	7,3	14,1	3,62	14,72	56,84
2008	7,12	15,45	4,87	15,08	55,46
2009	7,05	15,15	5,49	13,55	57,63
2010	7,41	14,13	5,51	11,68	59,85
2011	6,05	10,89	3,81	7,38	40,18
2012	5,08	10,9	5,16	7,23	39,22
2013	5,09	9,81	4,25	5,68	37,61
2014	5,19	9,6	3,93	4,09	34,5
2015	3,74	8,95	3,27	3,21	27,94
Rata-rata	6,04	12,15	4,33	9,66	47,06

Sumber: DISPENDA Kota Jambi, 2017

Berdasarkan pada tabel 1. rata-rata proporsi pajak hotel terhadap pajak daerah Kota Jambi selama tahun 2006-2015 adalah 6,04 %. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 7.41% dan yang terendah pada tahun 2015 sebesar 3,74%.

Rata-rata proporsi pajak restoran terhadap pajak daerah selama tahun 2006-2015 adalah sebesar 12,15 %. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 15,45%. Sedangkan proporsi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 8,95 persen.

Rata-rata proporsi pajak hiburan terhadap pajak daerah selama tahun 2006-2015 adalah sebesar 4,33%. Proporsi pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 15,08 persen.. Sedangkan proporsi pajak reklame terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 3,21 persen.

Rata-rata proporsi pajak reklame terhadap pajak daerah selama tahun 2006-2015 adalah sebesar 9,66%. Proporsi pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 15,08 persen.. Sedangkan proporsi pajak reklame terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 3,21 persen.

Rata-rata proporsi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah selama tahun 2006-2015 sebesar 47,06%. Proporsi tertinggi pada tahun 2006 sebesar 61,44% dan yang terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 27,94%.

Proporsi sumber-sumber pajak terhadap PAD Kota Jambi

Tabel 2 berikut memberikan proporsi sumber-sumber pajak (hotel, restoran, hiburan, reklame dan penerangan jalan) terhadap PAD Kota Jambi selama tahun 2006 – 2015.

Tabel 2. Proporsi sumber-sumber pajak terhadap PAD Kota Jambi Tahun 2006-2015 (%)

Tahun	Hotel	Restoran	Hiburan	Reklame	Penerangan Jalan
2006	2,85	5,56	1,53	6,24	27,45
2007	3,3	6,39	1,64	6,67	25,75
2008	3,22	6,98	2,2	6,81	25,06
2009	3,65	7,85	2,84	7,02	29,85
2010	3,71	7,08	2,76	5,85	30,64
2011	3,68	6,63	2,32	4,46	24,46
2012	3,29	7,06	3,34	4,69	25,43
2013	3,74	7,22	3,13	4,18	27,7
2014	2,71	5,02	2,05	2,13	18,03
2015	2,62	6,34	2,31	2,27	19,78
Rata-rata	3,27	6,61	2,41	5,05	25,41

Sumber: DISPENDA Kota Jambi, 2017

Berdasarkan pada tabel 2 rata-rata proporsi pajak hotel terhadap PAD Kota Jambi sebesar 3,27%. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 3,74% dan yang terendah pada tahun 2015 sebesar 2,62%.

Rata-rata proporsi pajak restoran terhadap PAD Kota Jambi sebesar 6,61% . Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7.22% dan proporsi terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,02%.

Rata-rata proporsi pajak hiburan terhadap PAD dari tahun 2006-2015 sebesar 2,41%. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu memberikan proporsi sebesar 3,34% dan proporsi terendah yaitu terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 1,53%.

Rata-rata proporsi pajak reklame PAD Kota Jambi selama tahun 2006-2015 sebesar 5,05%. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 7,02% dan yang terendah pada tahun 2014 sebesar 2,13%.

Rata-rata proporsi pajak penerangan jalan terhadap PAD Kota Jambi selama tahun 2006-2015 sebesar 25,41%. Proporsi tertinggi pada tahun 2010 sebesar 30,64% , dan yang terendah pada tahun 2014 sebesar 18,03%.

Elastisitas sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan elastisitas PAD Kota Jambi

Elastisitas penerimaan pajak hotel Kota Jambi

Tabel 3 menunjukkan bahwa elastisitas penerimaan pajak hotel terhadap PDRB Kota Jambi bersifat inelastis untuk tahun 2006, 2008, 2012 2014 dan 2015 sebab nilai elastisitas yang diperoleh lebih kecil dari 1. Ini berarti dengan adanya perubahan atas penerimaan pajak hotel di Kota Jambi sebesar 1 persen maka PDRB di Kota Jambi akan mengalami perubahan sebesar 1 persen. Terjadinya Inelastis pada tahun 2006, 2008, 2012, 2014 dan 2015 di sebabkan oleh penurunan pendapatan penarikan pajak hotel di Kota Jambi.

Tabel 3. Elastisitas penerimaan pajak hotel Kota Jambi

Tahun	Elastisitas	Kriteria
2006	0,03	Inelastis
2007	1,21	Elastis
2008	0,81	Inelastis
2009	1,26	Elastis
2010	1,79	Elastis
2011	2,31	Elastis
2012	0,19	Inelastis
2013	1,83	Elastis
2014	1,00	Inelastis
2015	0,15	Inelastis
Rata-rata	1,05	Elastis

Sumber: Data diolah, 2017

Untuk tahun 2007, 2009, 2010, 2011 dan tahun 2013 adalah bersifat elastis sebab nilai yang diperoleh lebih dari 1. Ini berarti dengan adanya perubahan atas penerimaan pajak hotel sebesar 1% maka PDRB akan mengalami perubahan lebih dari 1%. Jadi selama jangka yaitu sejak tahun 2007, 2009, 2010 dan tahun 2013 Pajak hotel dapat dinyatakan bersifat elastis terhadap PDRB sebab nilai yang didapat rata-rata sebesar 1,05. Ini berarti dengan adanya perubahan atas pajak hotel sebesar 1% akan bersifat mengubah PDRB lebih dari 1%.

Elastisitas penerimaan pajak restoran Kota Jambi

Untuk tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 dan tahun 2015 adalah bersifat elastis sebab nilai yang diperoleh lebih dari 1. Ini berarti dengan adanya perubahan atas penerimaan pajak restoran sebesar 1% maka PDRB akan mengalami perubahan lebih dari 1%.

Tabel 4. Elastisitas penerimaan pajak restoran Kota Jambi

Tahun	Elastisitas	Kriteria
2006	2,14	Elastis
2007	1,14	Elastis
2008	1,54	Elastis
2009	1,19	Elastis
2010	0,9	Inelastis
2011	1,82	Elastis
2012	1,36	Elastis
2013	1,07	Elastis
2014	0,85	Inelastis
2015	2,82	Elastis
Rata-rata	1,48	Elastis

Sumber: Data diolah, 2017

Elastisitas penerimaan pajak hiburan Kota Jambi

Untuk tahun 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, dan tahun 2015 adalah bersifat elastis sebab nilai yang diperoleh lebih dari 1. Ini berarti dengan adanya perubahan atas penerimaan pajak hiburan sebesar 1% maka PDRB akan mengalami perubahan lebih dari 1%. Jadi selama jangka yaitu sejak tahun 2006 – 2015 Pajak hiburan dapat dinyatakan bersifat elastis terhadap PDRB sebab nilai yang didapat rata-rata sebesar 1,66. Ini berarti dengan adanya perubahan atas pajak hiburan sebesar 1% akan bersifat mengubah PDRB lebih dari 1%.

Tabel 5. Elastisitas penerimaan pajak hiburan Kota Jambi

Tahun	Elastisitas	Kriteria
2006	1,2	Elastis
2007	0,7	Inelastis
2008	3,05	Elastis
2009	2,49	Elastis
2010	1,44	Elastis
2011	0,99	Inelastis
2012	3,91	Elastis
2013	0,53	Inelastis
2014	0,64	Inelastis
2015	1,66	Elastis
Rata-rata	1,66	Elastis

Sumber: Data diolah, 2017

Elastisitas penerimaan pajak reklame Kota Jambi

Untuk tahun 2006, 2008, 2012 dan 2015 adalah bersifat elastis sebab nilai yang diperoleh lebih dari 1. Ini berarti dengan adanya perubahan atas penerimaan pajak reklame sebesar 1% maka PDRB akan mengalami perubahan lebih dari 1%.

Tabel 6. Elastisitas penerimaan pajak reklame Kota Jambi

Tahun	Elastisitas	Kriteria
2006	1,06	Elastis
2007	0,67	Inelastis
2008	1,09	Elastis
2009	0,45	Inelastis
2010	0,38	Inelastis
2011	0,36	Inelastis
2012	1,21	Elastis
2013	0,26	Inelastis
2014	-0,15	Inelastis
2015	1,10	Elastis
Rata-rata	0,64	Inelastis

Sumber: Data diolah, 2017

Elastisitas penerimaan pajak penerangan jalan Kota Jambi

Untuk tahun 2009, 2010, 2012, dan 2013 adalah bersifat elastis sebab nilai yang diperoleh lebih dari 1. Ini berarti dengan adanya perubahan atas penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 1% maka PDRB akan mengalami perubahan lebih dari 1%. Jadi selama jangka yaitu sejak tahun 2006 – 2015 Pajak penerangan jalan dapat dinyatakan bersifat elastis terhadap PDRB sebab nilai yang didapat rata-rata sebesar 2,42. Ini berarti dengan adanya perubahan atas pajak penerangan jalan sebesar 1% akan bersifat mengubah PDRB lebih dari 1%.

Tabel 7. Elastisitas penerimaan pajak penerangan jalan Kota Jambi

Tahun	Elastisitas	Kriteria
2006	0,05	Inelastis
2007	-0,06	Inelastis
2008	0,81	Inelastis
2009	1,7	Elastis
2010	1,7	Elastis
2011	0,78	Inelastis
2012	1,18	Elastis
2013	1,48	Elastis
2014	0,61	Inelastis
2015	1,39	Inelastis
Rata-rata	0,96	Inelastis

Sumber: Data diolah, 2017

Elastisitas PAD Kota Jambi

Untuk tahun 2006, 2010, 2011 dan 2014 adalah bersifat elastis sebab nilai yang diperoleh lebih dari 1. Ini berarti dengan adanya perubahan atas pendapatan asli daerah sebesar 1% maka PDRB akan mengalami perubahan lebih dari 1%.

Tabel 8. Elastisitas PAD Kota Jambi

Tahun	Elastisitas	Kriteria
2006	1,33	Elastis
2007	0,27	Inelastis
2008	0,97	Inelastis
2009	0,22	Inelastis
2010	1,66	Elastis
2011	2,37	Elastis
2012	0,91	Inelastis
2013	0,93	Inelastis
2014	2,54	Elastis
2015	0,56	Inelastis
Rata-rata	1,07	Elastis

Sumber: Data diolah, 2017

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Proporsi sumber pajak terbesar terhadap total pajak dan PAD di Kota Jambi bersumber dari pajak penerangan jalan, sedangkan proporsi terendah dari pajak hiburan. Rata-rata proporsi pajak penerangan jalan terhadap total pajak dan PAD Kota Jambi selama periode Tahun 2006 – 2015 masing-masingnya sebesar 47,06 persen dan 25,41 persen. Rata-rata proporsi

pajak hiburan terhadap total pajak dan PAD Kota Jambi selama periode Tahun 2006 – 2015 masing-masingnya sebesar 4,33 persen dan 2,41 persen.

Selanjutnya, elastisitas pajak terbesar di Kota Jambi adalah pajak hiburan dan yang terendah adalah pajak reklame. Rata – rata elastisitas pajak hiburan dan pajak reklame selama periode Tahun 2006 – 2015 masing-masingnya adalah 1,66 dan 0,64.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan penerimaan dari seluruh komponen- komponen pajak daerah yang telah terjadi lebih di stabilkan dan di mobilisasi oleh pemerintah Kota Jambi agar dampaknya lebih dirasakan signifikan terhadap peningkatan pajak daerah Kota Jambi. Selain itu perlu optimalisasi dalam penerimaan dan penggunaan pajak daerah di Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Widia.(2012). *Analisis Elastisitas Pajak Daerah Kota Jambi Periode 2005-2010*. Skripsi FE UNJA.
- Badan Pengelola Keuangan Daerah.(2015). *Laporan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi*, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota: Jambi.
- Badan Pusat Statistik Kota Jambi.(2014). *Kota Jambi Dalam Angka*: Jambi
- Bangun, Wilson.(2007). *Teori Ekonomi Mikro*. Refika Aditama: Bandung
- Dajan, A.(1993). *Pengantar Metode Statistik Jilid 1*, LP3ES: Jakarta
- Damarsari, R., Junaidi, J., & Yulmardi, Y. (2015). Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(3), 161-172
- Enggar, Rahayu, S, Wahyudi.(2011). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi J ambi tahun 2002-2009*. Skripsi. Universitas Jambi. Tidak dipublikasikan.
- Gujarati, Damodar .(2003). *Ekonometrika dasar*. Erlangga: Jakarta
- Halim, Abdul.(2004). *Manajemen Keuangan Daerah* Edisi Revisi. UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo.(2004). *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta
- Nazir, M .(1999). *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Suparmoko, M.(2002). *Ekonomi Publik (Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah)*. Edisi 1. Andi: Yogyakarta
- Rahmadi, Selamet dkk.(2003). *Analisis Elastisitas Penerimaan Asli Daerah Terhadap Pembiayaan Pembangunan di Provinsi Jambi*. *Jurnal Ekonomi FE UNJA*.
- Saputra, Ryan.(2007). *Analisis Perkembangan Penerimaan Daerah Kota Jambi Dari Bagian Pendapatan Asli Daerah Periode 1996-2005*. Skripsi FE UNJA.
- Sukirno, Sadono.(2006). *Makro Ekonomi (Teori Pengantar)*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sidik, M .(1994). *Keuangan Daerah*. Universitas: Jambi.
- Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*. 2008. Jambi. CitraUmbara.
- Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. 2008. CitraUmbara: Jambi.